

## ABSTRAK

Berkembangnya teknologi finansial mengeluarkan banyak inovasi khususnya pada produk inovasi investasi yaitu *crypto asset*. Pelarangan Bank Indonesia untuk masyarakat menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran membuat Kementerian Perdagangan bersama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengesahkan *cryptocurrency* sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan dalam Bursa Berjangka. Perdagangan berjangka komoditi adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfa'atkan agar masyarakat terhindar dari resiko *cryptocurrency* yang fluktuatif dan dapat menyebabkan penggelembungan harga. Namun dalam praktiknya, transaksi aset kripto tidak terlepas oleh resiko kerugian yang bisa dialami oleh Investor yang melakukan jual beli aset kripto dalam Bursa Berjangka. Resiko terkait tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan aset dan dasar harga, serta tindak kriminal dalam internet seperti *hacking* dan *scam* yang bisa menyerang akun nasabah (investor) dimana hal tersebut sudah diluar tanggung jawab badan usaha aset kripto. Peraturan Bappebti yang baru dinilai masih kurang terhadap perlindungan hukum bagi para Investor terkait kerugian yang disebabkan oleh nasabah atau Investor lain secara individu. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mencari solusi bagi masalah yang dihadapi Investor dalam kegiatan perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka.

**Kata Kunci : Transaksi Aset Kripto; Aset Digital; Bursa Berjangka; Perlindungan Hukum;**